



TESIS

Judul:

Penggunaan Alat Bukti Yang Dilindungi Tax
Amnesty Dalam Penetapan Tersangka Dan Melakukan
Penahanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Disusun Oleh:

YOSUA HASUDUNGAN WILBUR
NIM. 20721201074

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**PENGUNAAN ALAT BUKTI YANG DILINDUNGI TAX AMNESTY
DALAM PENETAPAN TERSANGKA DAN MELAKUKAN PENAHANAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK**

TESIS

Diajukan Untuk Menenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh:

Nama : Yosua Hasudungan Wilbur

NIM : 20721201074

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025**

Pengesahan

Nama : YOSUA HASUDUNGAN WILBUR
NIM : 207212010
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul Tesis : Penggunaan Alat Bukti Yang Dilindungi Tax Amnesty
Dalam Penetapan Tersangka Dan Melakukan Penahanan
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2016
Tentang Pengampunan Pajak
Title : The Use Of Evidence Protected By Tax Amnesty In
Determining Suspects And Making Detentions Based On
Law Number 11 Of 2016 Concerning Tax Amnesty

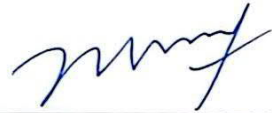
Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 16-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. AMAD SUDIRO, S.H., M.Hum, M.M., Dr., MKn., Prof
3. I Ketut Sukewati Lanang P, Dr., S.H., M.H.

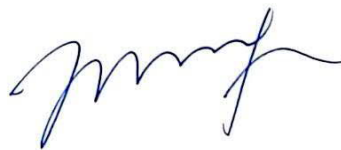
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
AMAD SUDIRO, S.H., M.Hum, M.M., Dr.,
MKn., Prof
NIK/NIP: 10292010



Jakarta, 16-Januari-2025

Ketua Program Studi



AMAD SUDIRO, S.H., M.Hum, M.M., Dr., MKn., Prof

Persetujuan

Nama : YOSUA HASUDUNGAN WILBUR
NIM : 207212010
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Penggunaan Alat Bukti Yang Dilindungi Tax Amnesty
Dalam Penetapan Tersangka Dan Melakukan Penahanan
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2016
Tentang Pengampunan Pajak

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 06-Januari-2025

Pembimbing:
AMAD SUDIRO, S.H., M.Hum, M.M., Dr.,
MKn., Prof
NIK/NIP: 10292010



Abstrak

Penelitian ini membahas penggunaan dokumen yang dilindungi tax amnesty sebagai alat bukti dalam proses penetapan tersangka dan melakukan penahanan oleh Penyidik, dalam hal ini oleh Bareskrim Mabes Polri, dengan studi kasus pengalihan saham Success Overseas Finance Limited (SOFL) ke PT Grahaidea Selarasindo (PT GS). Dokumen-dokumen terkait pengampunan pajak yang digunakan sebagai alat bukti tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti karena cara perolehan barang bukti melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yang melarang data terkait tax amnesty digunakan dalam penyidikan, penuntutan, atau penyelidikan pidana. Berdasarkan penelitian hukum normatif, tindakan Bareskrim Mabes Polri sebagai Penyidik dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, karena penggunaan alat bukti yang tidak sah berpotensi menghilangkan syarat minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP sehingga penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan berpotensi dinyatakan tidak sah. Penelitian ini menyoroti pentingnya integritas hukum dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus memberikan rekomendasi atas upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum khususnya dalam tahap penyidikan.

Kata Kunci: Tax Amnesty; Penyalahgunaan Wewenang; Perlindungan Hukum.

Abstract

This research discusses the use of documents protected by tax amnesty as evidence in the process of determining suspects and making detentions by Investigators, in this case by Bareskrim Police Headquarters, with a case study of the transfer of Success Overseas Finance Limited (SOFL) shares to PT Grahaidea Selarasindo (PT GS). The tax amnesty-related documents used as evidence do not meet the formal requirements of evidence because the method of obtaining evidence violates Article 20 of Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty, which prohibits tax amnesty-related data from being used in criminal investigations, prosecutions, or investigations. Based on normative legal research, the actions of the Police Headquarters Criminal Investigation Unit as an Investigator are considered contrary to the principle of legal certainty, because the use of unauthorized evidence has the potential to eliminate the minimum requirement of two pieces of evidence as stipulated in the Criminal Procedure Code so that the determination of suspects and detention carried out is potentially declared invalid. This research highlights the importance of legal integrity and protection of rights and obligations specified in laws and regulations, as well as providing recommendations for legal remedies that can be taken to overcome abuse of authority by law enforcement officials, especially in the investigation stage.

Keywords: *Tax Amnesty; Abuse of Authority; Legal Protection.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulisan tesis ini dengan judul “Penggunaan Alat Bukti Yang Dilindungi Tax Amnesty Dalam Penetapan Tersangka dan Melakukan Penahanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak” dapat dituntaskan oleh Penulis dengan lancar dan tepat waktu. Penulisan tesis ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi Strata 2 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat memperoleh gelar Magister Hukum. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Rektor Universitas Tarumanagara dan Pembimbing yang membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian;
2. Bapak Dr. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Kak Dela Vineza S.Psi., M.M., selaku Asisten Sekretaris Magister & Doktor Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Nilakusuma Dewayani selaku keluarga penulis, yang terus memberikan doa dan dukungan secara fisik maupun psikis bagi penulis;
5. Seluruh dosen pengampu mata kuliah yang pernah diambil oleh penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu selama menjadi mahasiswa di Universitas Tarumanagara atas ilmu yang bermanfaat selama ini;

6. Jessica Gabriella, S.H., selaku pasangan yang sangat membantu dan selalu mendampingi serta memberikan dorongan mental dalam penulisan Tugas Akhir ini;
7. Seluruh rekan-rekan seperbimbingan penulis dari satu Angkatan penulis dari Magister Hukum yang tidak bisa disebutkan penulis satu persatu.

Jakarta, 3 Januari 2025



Yosua Hasudungan Wilbur

Nim : 20721201074

Pernyataan

Nama : YOSUA HASUDUNGAN WILBUR
NIM : 207212010
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Penggunaan Alat Bukti Yang Dilindungi Tax Amnesty
Dalam Penetapan Tersangka Dan Melakukan Penahanan
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2016
Tentang Pengampunan Pajak

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 06-Januari-2025
Yang menyatakan



YOSUA HASUDUNGAN WILBUR
NIM. 207212010

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan.....	ii
Persetujuan.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	vi
Orisinalitas.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Singkatan.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Landasan Konseptual.....	16
B. Kerangka Teoritis.....	24
1. Teori Kepastian Hukum.....	24
2. Teori Perlindungan Hukum.....	31
3. Teori Hak Asasi Manusia.....	37
4. Teori Kewenangan.....	46
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	48

A. Perkembangan Alat Bukti dalam Tindak Pidana di Indonesia.....	48
B. Alur dan Prosedur Penanganan Perkara oleh Bareskrim Mabes Polri.....	53
C. Prosedur Penanganan Perkara dan Kewenangan Penyidik dalam Hukum Acara Pidana.....	75
D. Peraturan Perundang-Undangan mengenai Penetapan Tersangka dan Penahanan Pada Tahap Penyidikan oleh Kepolisian.....	84
E. Peraturan Perundang-Undangan mengenai Minimum Alat Bukti dalam Penyidikan.....	87
F. Landasan Hukum dalam Pengajuan Upaya Hukum Praperadilan.....	89
G. Data Hasil Wawancara.....	93
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	106
A. Penerapan Tax Amnesty Sebagai Bukti Oleh Bareskrim Mabes Polri Untuk Melakukan Penetapan Tersangka Dan Penahanan Pada Tahap Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.....	106
B. Upaya Hukum Atas Penggunaan Tax Amnesty Yang Dilindungi Sebagai Bukti Dalam Menetapkan Tersangka Dan Melakukan Penahanan Oleh Bareskrim Mabes Polri	131
BAB V PENUTUP.....	149
A. Kesimpulan.....	149
B. Saran.....	150

Daftar Pustaka

DAFTAR SINGKATAN

PT	: Perseroan Terbatas
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Keputusan Dekan Tentang Pembimbing Tesis
Lampiran III	: Berita Acara Bimbingan Tesis
Lampiran IV	: Surat Keterangan Turnitin Tesis
Lampiran V	: Hasil Turnitin Tesis
Lampiran VI	: Letter of Acceptance Jurnal
Lampiran VII	: Surat Keterangan Terbit Jurnal
Lampiran VIII	: Hasil Turnitin Jurnal